



## Anggaran Kebencanaan Pemkot Yoga Menipis

**YOGYA, TRIBUN** - Anggaran kebencanaan Kota Yogyakarta dalam kondisi cekak menghadapi potensi cuaca ekstrem yang diprediksi bakal melanda hingga November 2025 mendatang.

Meski demikian, sihergi dengan program-program pemerintah kota dan kesiapsiagaan selama 24 jam penuh menjadi kunci utama untuk mengantisipasi dampak bencana.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta, Nur Hidayat, mengungkapkan bahwa alokasi anggaran BPBD berfokus pada kegiatan kesiapsiagaan dan pemulihan pasca-bencana.

Untuk program pemulihan seperti bantuan atap roboh, pihaknya mengucurkan anggaran melalui penyaluran bantuan material dengan nilai maksimal Rp20 juta per titik, disesuaikan tingkat kerusakannya.

"Total anggaran kami Rp150 juta. Sampai hari ini, sepanjang tahun ini, sudah 12 titik yang kami tangani. Jadi, sisa anggaran untuk kebutuhan itu tinggal sekitar Rp30 juta," katanya, Rabu (29/10).

Ia berharap sisa anggaran tersebut dapat mencukupi kebutuhan, setidaknya hingga Desember, seraya berharap supaya bencana alam tidak terjadi secara masif.

Mengenai pengurangan Belanja Tidak Terduga (BTT), Nur Hidayat menjelaskan, bahwa alokasinya baru bisa diaktifkan jika statusnya sudah tanggap darurat.

Sedangkan insiden yang terjadi akhir-akhir ini, seperti longsor tebing dan lain-lain, masih bisa ditangani melalui APBD, dengan pengerjaan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Permukiman (PUPKP).

"Kita sampai hari ini belum masuk BTT. Apalagi, BTT kan bukan untuk (mengambil) keperluan terkait kebencanaan saja, tapi juga non-kebencanaan," terangnya.

Dalam upaya mitigasi, Nur Hidayat sangat mengapresiasi dukungan dari Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, melalui deretan gerakan strategisnya.

Ia merindi, program-program layaknya bersih-bersih sungai yang mencegah banjir, lalu program bedah rumah yang mengantisipasi bangunan roboh, sangat meringankan tugas BPBD.

"Pak Wali Kota luar biasa, ini sudah ngeang-ngewangi tugas BPBD. Sehingga, sangat mendukung sekali terhadap antisipasi dampak bencana ekologis yang mungkin terjadi," jelasnya.

"Berdasarkan hasil pemetaan potensi bencana, walaupun yang paling rawan itu adalah gempa, tetapi yang paling sering terjadi selama ini memang cuaca ekstrem," tambah Nur Hidayat.

Lebih lanjut, Kalak pun memastikan kesiapan personelnya selama 24 jam penuh, untuk pemantauan maupun penanganan kejadian-kejadian kebencanaan di wilayah.

Kesiapan tersebut juga didukung oleh komunikasi aktif dengan elemen warga masyarakat lewat radio, melalui para pengurus KTB (Kampung Tangguh Bencana).

"Tu bagian dari manajemen risiko, dengan maksud mengurangi, menghilangkan atau meminimalkan korban jiwa kalau terjadi suatu kebencanaan," urainya.

**Terjamin BTT**

Kepala Pelaksana BPBD DIY, Drs. Nowar Rahmad, M.Si, menegaskan bahwa mekanisme pembiayaan untuk penanganan bencana tetap terjamin melalui dana Belanja Tidak Terduga (BTT). Dana ini bisa diakses sewaktu-waktu jika terjadi bencana di wilayah DIY.

"Enggak ada kendala. Karena kalau untuk BPBD, apabila terjadi bencana, kita sudah punya dana BTT yang bisa diakses sewaktu-waktu. Walaupun anggaran rutinnya minim, dana BTT itu masih ada. Jadi, ketika terjadi bencana dan statusnya sudah ditetapkan, nanti bisa langsung diakses," katanya.

Terkait dengan bantuan bronjong di beberapa daerah yang sebelumnya dianggarkan, BPBD DIY memastikan bahwa pelaksanaannya belum tuntas karena keterbatasan stok. Pengadaan bronjong baru akan dilakukan kembali dengan memanfaatkan dana BTT jika terjadi bencana.

"Belum semuanya terlaksana, karena realisasinya sesuai jumlah stok yang ada. Sekarang stok kita kosong. Nanti kalau terjadi bencana, maka kita akses dana BTT untuk pembelian bronjong," ujarnya.

Tahun lalu, menurut Nowar, pengadaan bronjong mencapai nilai sekitar Rp500 juta, namun saat ini sudah habis terpakai.

"Kemarin juga dari BSO sudah mengestimasi sekitar 3.500 unit. Tapi itu nanti kita aksesnya melalui BTT. Jadi ketika ada bencana dan ada kebutuhan bronjong, kita langsung minta BPBD untuk membelikan bronjong sesuai kebutuhan penanganan bencana," katanya.

Selain dana BTT, BPBD DIY juga telah menganggarkan pengadaan sarana dan prasarana kebencanaan untuk 15 Kelompok Penanggulangan Bencana (Kelpana) pada tahun anggaran 2026. Program ini merupakan lanjutan dari pengadaan yang telah berjalan sejak tahun 2023.

"Kita, jadi setiap Kelpana itu ada sekitar 15 kelompok. Nanti di tahun 2026 kita anggar untuk pembelian sarana-prasarana berupa alat kerja bakti, perlengkapan pengungsian, termasuk chainsaw dan lain-lain," terang Nowar.

Program ini mencakup seluruh wilayah DIY. Hingga kini, terdapat 358 Kelpana aktif yang tersebar di lima kabupaten/kota. "Ya, di seluruh DIY. Sebelumnya juga sudah ada yang kita distribusikan di tahun 2023, 2024, dan 2025," ujarnya.

"Untuk tahap 2026 nanti, jumlahnya 15 Kelpana. Setiap tahun memang ada yang kita berikan," lanjutnya.

Bantuan diberikan dalam bentuk peralatan fisik, bukan uang tunai. "Bantuan itu berupa peralatan, seperti cangkul, angkong, linggis, chainsaw, gergaji, tenda, mantel, dan sebagainya. Totalnya ada sekitar 13 jenis peralatan," jelasnya.

BPBD DIY mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama bagi warga yang tinggal di sekitar lereng, bantaran sungai, dan kawasan rawan pohon tumbang. Puncak musim hujan diperkirakan berlangsung hingga Desember 2025, dengan potensi peningkatan curah hujan di atas normal. **(aka/han)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPBD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005